

UPAYA BAKOR PAKEM DALAM MENCEGAH PERKEMBANGAN POTENSI RADIKALISME DI KABUPATEN KEPAHANG

Muhammad Ridwan

Program Studi Filsafat Agama Pascasarjana IAIN Bengkulu

Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, 36144

Email: Muhammad_ridwan@gmail.com

Abstract: Background This study is a radical ideology as a basis for the alleged terror bombing. Indonesia makes this ideology as it feared more widespread. Kepahiang District participated prevent this ideology does not escalate. Formulation of the problem in this research is: How Bakor Pakem efforts in preventing the development potential of radicalism in the District Kepahiang?. This study examined the potential radicalism in Kepahiang and preventive measures by Bakor Pakem. This type of study is a qualitative research with descriptive and analytical nature. The study found that there is a potential Kepahiang District of religious radicalism. Some residents Kepahiang is a member of the organization Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), the Islamic Defenders Front (FPI) and the former followers of the Movement Fajar Nusantara (Gafatar). While in Kepahiang yet these organizations. Preventive measures that do Bakor Pakem are: first, to collect information that will be members of Bakor Pakem ranging from intelligence work by the police (Police) and the Indonesian Military (Kodim and Koramil). Second, the monthly reports submitted by the Office of National and Political Unity government Kepahiang District. The third discussion meeting held as chairman of the State Attorney Bakor Pakem with members. Fourth. Prevention is done by each agency and organization Bakor Pakem corresponding basic tasks and functions of each. The Police with intelligence work and guidance of the community, the military intelligence and guidance of an integrated, the Ministry of Religious Affairs with public education, the Indonesian Ulema Council with public education, the Forum for Religious Harmony (FKUB) with coordination and communication between religious communities and socialize together involve berbagai elements of society, And the declaration of refusal schools of ISIS and radicalism involving various organizations and educational institutions.

Keywords: Bakor Pakem Efforts, Preventing Radicalism

Abstrak: Latar Belakang Masalah penelitian ini adalah paham radikal dituduhkan sebagai dasar untuk melakukan teror peledakan bom. Indonesia menjadikan paham ini sebagai hal yang ditakutkan makin meluas. Kabupaten Kepahiang ikut serta mencegah paham ini agar tidak berkembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya Bakor Pakem dalam mencegah perkembangan potensi radikalisme di Kabupaten Kepahiang? Penelitian ini meneliti potensi radikalisme di Kepahiang dan langkah-langkah pencegahannya oleh Bakor Pakem. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analitik. Penelitian menemukan bahwa di Kabupaten Kepahiang terdapat potensi radikalisme keagamaan. Beberapa orang warga masyarakat Kepahiang adalah anggota dari organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Sementara di Kepahiang belum ada organisasi-organisasi tersebut. Langkah pencegahan yang dilakukan Bakor Pakem adalah: pertama, menghimpun informasi yang dilakukan anggota Bakor Pakem mulai dari kerja intelijen oleh aparat kepolisian (Polres) dan Tentara Nasional Indonesia (Kodim dan Koramil). Kedua, laporan bulanan yang disampaikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pemerintah Kabupaten Kepahiang. Ketiga rapat pembahasan yang diadakan Kejaksaan Negeri sebagai ketua Bakor Pakem dengan anggota Bakor Pakem. Keempat. Pencegahan yang dilakukan oleh masing-masing instansi dan organisasi Bakor Pakem sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Polres dengan kerja intelijen dan bimbingan masyarakat, TNI dengan intelijen dan bimbingan terpadu, Kantor Kementerian Agama dengan penyuluhan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia dengan penyuluhan masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) dengan koordinasi dan komunikasi antar pemeluk agama dan sosialisasi bersama melibatkan berbagai elemen masyarakat. Serta deklarasi penolakan faham ISIS dan radikalisme melibat berbagai organisasi dan lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Upaya Bakor Pakem, Perkembangan Potensi Radikalisme

A. Pendahuluan

Tragedi peledakan bom di berbagai negara belakangan ini telah memicu popularitas istilah radikalisme oleh berbagai kalangan. Negara-negara di Amerika dan Eropa selalu mengaitkan peristiwa peledakan bom yang terjadi tersebut dengan kelompok yang menganut faham radikal, kaum fundamentalis dan kelompok garis keras yang selalu menebar berbagai aksi teror terhadap negara dan masyarakat.

Dengan kemajemukan masyarakat ini, masyarakat di kabupaten ini bisa menjadi potensi penyumbang positif pembangunan. Namun, keberadaannya juga bisa menjadi potensi negatif penyumbang konflik jika terjadi gesekan. Dengan segala potensi masyarakat di Kabupaten Kepahiang, potensi konflik sesungguhnya sangat besar dan terbuka. Begitu juga potensi berkembangnya faham radikal yang mengarah kepada konflik orizontal dan vertikal yang berujung kepada anarkhisme bahkan terorisme. Karena masyarakatnya plural dan memiliki berbagai karakter seperti fanatisme, egoisme, sukuisme dan radikalisme.

Potensi radikalisme di Kepahiang bisa dilihat dari beberapa indikasi berikut: Pertama, Bakor Pakem Kabupaten Kepahiang pada November 2015 mengadakan sosialisasi dengan tema sebagai berikut: Dengan sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) dengan tema kita wujudkan cegah tangkal untuk keamanan dan ketertiban dari faham radikal dan aliran yang menyimpang.

Kepala Kejaksaan dalam suatu kesempatan meminta Bakor Pakem Kabupaten Kepahiang dan masyarakat harus bekerjasama mengawasi aliran radikal dan faham menyimpang dalam masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan kepada pemerintah terdekat seperti Kepala Desa, Camat, Polsek dan Pemda. Kemudian, Kejaksaan juga mendata pondok pesantren yang ada di Kepahiang. Kedua, berdasarkan informasi dari Kasat Intelkam Polres Kepahiang, ada satu tempat yang jadi objek pengawasan Polres terkait potensi

radikalisme. tempat tersebut ada di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Hanya saja di tempat itu mereka tidak berbentuk kelompok, melainkan pribadi dan keluarga yang mengadakan pengajian dan pertemuan dengan tamu dari luar daerah yang terindikasi ada hubungan dengan pelaku teror di pulau Jawa. Ketiga, Menurut ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang, dari beberapa informasi masyarakat, disinyalir ada tiga tempat bibit-bibit yang berpotensi memiliki faham radikal, namun tidak berbentuk kelompok. Melainkan berafiliasi dengan group luar daerah. Keempat, Informasi potensi radikalisme lainnya penulis terima dari seorang guru PNS asal pulau Jawa yang mempunyai hubungan dengan seorang anggota BIN (Badan Intelijen Negara) yang berasal dari daerah yang sama, menginformasikan ada tiga tempat yang sedang dilakukan pengawasan oleh anggota BIN di Kepahiang terkait potensi kelompok radikalisme, yaitu di Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Muara Kemumu dan Kecamatan Merigi. Tiga tempat ini dicurigai sebagai potensi radikalisme, karena aktifitasnya dan relasinya berkaitan dengan kelompok teroris di berbagai tempat di Indonesia seperti jakarta.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Upaya Bakor Pakem Dalam Mencegah Perkembangan Potensi Radikalisme di Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui potensi radikalisme di Kabupaten Kepahiang, langkah-langkah dan program atau kegiatan pencegahan berkembangnya potensi radikalisme oleh Bakor Pakem Kabupaten Kepahiang.

D. Landasan Teori Potensi Radikalisme

Potensi radikalisme sangat besar dan banyak faktor. Hampir segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat manusia bisa menjadi potensi radikalisme. Politik misalnya, bisa menjadi

gerakan yang cenderung radikal. Begitu juga pemeluk suatu agama tertentu.

Menurut Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Zainal Abidin. Potensi radikalisme terjadi muncul akibat pemahaman agama yang sempit dan tertutup. Orang yang tertutup dan sempit pemahaman agamanya akan berpotensi menjadi radikal, sehingga itu mereka bawa sampai titik darah penghabisan.¹

Selain faktor tersebut, potensi radikalisme juga akibat lain seperti interaksi manusia dengan manusia lain. Baik yang ada di Indonesia, maupun yang berinteraksi dengan manusia di negara lain. Dengan adanya interaksi, paham radikal bisa berkembang dalam bentuk jaringan. Tidak hanya jaringan radikalisme bahkan menjadi jaringan teror berskala internasional.

Terbentuknya jaringan internasional dalam kelompok-kelompok ekstrem Islam yang di antaranya beroperasi di wilayah Indonesia, juga terlihat dalam elemen kelompok Islam pimpinan Abdullah Sungkar yang bermarkas di Malaysia. Relasi yang kemudian dibangun oleh elemen di bawah kepemimpinan Abdullah Sungkar dengan tokoh Ikhwanul Muslimin garis keras yang dipimpin oleh syekh Omar bin Abdul Rahman, telah menyebabkan kelompok ini menyebut NII, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai gerakan Islam garis keras juga memiliki relasi yang luas dengan beberapa cabang Hizbut Tahrir yang ada di beberapa negara.²

Potensi yang juga dapat memicu lahir dan berkembangnya radikalisme adalah perasaan kecewa terhadap suatu realita dan suatu keputusan yang tidak membawa manfaat yang bisa dirasakan. Di sisi lain karena adanya kebijakan yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain dan adanya keberpihakan pemerintah kepada suatu golongan yang dianggap rival bagi pihak lainnya. Di Indonesia ini bisa menjadi satu faktor yang berpotensi memicu lahirnya radikalisme. Dalam keprustasiannya, kelompok radikal ini melakukan aksi-aksi sebagai unjuk rasa atas kekecewaan.

Menguatnya arus radikalisme di kalangan umat Islam juga dapat dianalisis dari gejala psikopolitik pasca reformasi. Dalam konteks

ini munculnya radikalisme terkait erat dengan tumbuhnya susana terdeprivasinya umat Islam.³

Dalam pandangan Robert Gurr, munculnya kesenjangan yang melebar antara realitas yang terjadi dengan harapan-harapan yang tidak terpenuhi akan melahirkan perasaan terdeprivasi (sense of deprivation) pada sekelompok besar, baik menyangkut soal pendapatan, kesejahteraan, status sosial, kualitas hidup, maupun kebebasan politik.⁴

Hipotesa dasar Gurr adalah semakin kuat perasaan kesenjangan atau deprivasi relatif individu atau kelompok, yang ditandai dengan keterasingan dan frustrasi yang mendalam atas kondisi yang berlangsung, maka kecenderungan untuk berpartisipasi dalam aksi politik kekerasan semakin tinggi pula.⁵

Menurut M Zaki Mubarak, perasaan terdeprivasi yang meluas dalam individu maupun kelompok Muslim di tanah air, terutama pada segi perasaan keagamaan dan status sosial yang terancam, merupakan salah satu faktor yang turut mendorong bagi berkembang suburnya radikalisme keagamaan.⁶

M Zaki Mubarak juga memberi sebuah penjiwaan terkait radikalisme keagamaan, radikalisme Islam terhadap pertumbuhan demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Menurutnya, meskipun demikian gerakan Islam radikal atau fundamentalis sama sekali bukan representasi dari umat Islam Indonesia pada umumnya. Mayoritas umat Islam Indonesia, setidaknya sebagaimana tercermin dalam garis politik berbagai organisasi massa Islam terkemuka semacam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, adalah berhaluan moderat. Dengan demikian kekhawatiran yang terlalu berlebihan terhadap gerakan-gerakan ini sebagai ancaman serius terhadap masa depan demokrasi di negeri ini, sebenarnya tidak beralasan.⁷

³ Abdul Umar, *Konspirasi intelijen dan Gerakan Islam Radikal*, (Jakarta: Cedsos 2005) h.353

⁴ Robert Gurr, *Why Men Rebel* (Princeton NJ: Princeton University Press, 1970), h.24-29 dan dapat dibaca pada buku M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam radikal....*, h. 353

⁵ David Sanders "Behavioral Analysis" dalam David Marsh and Gerry Stoker (eds), *Theory and Methods in Political Science* (Hampshire and London: Macmillan Press Ltd, 1995), h. 69 bisa dibaca dalam buku M zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal....*, h. 353

⁶ Zada Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, (Jakarta: Teraju, 2008) h.354

⁷ Tarmudi, Endang dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press). 1998 h.358

¹ Rimanews, *Dialog Publik Menangkal Radikalisme atas Nama Agama*. (Palu: 27/11/2015)

² M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia....*, h.352.

Tingginya tekat sebagai dasar motifasi memperjuangkan gerakan radikalisme, baik yang berdasarkan politik, sosial, ekonomi maupun agama, serta gerakan yang tidak pernah terputus, tokoh radikal selalu menemukan celah untuk tetap bertahan dan berkembang. Mulai dari usaha kaderisasi sebagai upaya kelanjutan perjuangan, juga memanfaatkan situasi dan waktu untuk bersikap dan bertindak.

Terlepas dari kontroversi dan silang pendapat dalam memberikan pemaknaan mengenai meningkatnya pandangan perlunya pemberlakuan syariat Islam secara ketat, namun perkembangan yang berlangsung di lapangan menggambarkan bagaimana tuntutan-tuntutan pemberlakuan syariat Islam tidak lagi menjadi sekedar wacana⁸

Agenda formalisasi syariat Islam terus bergerak dan menyebar melalui berbagai ruang-ruang politik yang ada, salahsatu caranya dengan mendompleng pada kebijakan pemerintah daerah yang kini otonomi. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan ruang-ruang kebebasan atau otonomi untuk membuat peraturan-peraturan daerah (Perda) yang lepas dari campur tangan pemerintah pusat, merupakan sasaran paling tepat untuk dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik lokal dalam mewujudkan tuntutannya.

Dengan membonceng otonomi daerah inilah maka proses perumusan perda-perda menjadi arena pertarungan paling sengit yang menentukan berhasil atau tidaknya keinginan untuk mewujudkan aspirasi pemberlakuan syariat Islam. Sebagaimana akhirnya terbukti, di beberapa daerah seperti Cianjur, Garut, Banten, Indramayudan Pamekasan.

Kecenderungan gerakan” syariatisasi” yang memanfaatkan instrumen otonomi daerah ini di luar perkiraan banyak kalangan sebelumnya. Dalam kebijakan mengenai otonomi daerah itu sendiri terdapat pembagian kewenangan antara apa yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada pasal 7 UU Nomor 22/1999, misalnya memuat kewenangan daerah yang mencakup seluruh bidang pemerintahan

kecuali beberapa hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni urusan politik luar negeri, bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, urusan agama dan moneter fiskal.

Begulirnya ide-ide untuk meberlakukan syariat Islam dalam kerangka otonomi daerah seperti diinspirasi oleh adanya kebijakan pemerintah pusat yang bersifat istimewa terhadap daerah Aceh, yang menawarkan kemungkinan pemberlakuan syariat Islam di daerah tersebut.⁹

Di luar Jawa, gaung yang paling kuat memberlakukan syariat Islam terjadi di beberapa tempat seperti di Sulawesi Selatan. Di wilayah ini tengah terjadi tarik menarik yang kuat antara kelompok yang menghendaki dan menolak keinginan formalisasi syariat Islam. Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan sendiri telah merespon suara-suara tersebut melalui jajak pendapat yang luas, terutama ditujukan kepada aparat-aparat pemerintahan daerah, mengenai pandangan mereka terhadap ide pemberlakuan syariat Islam. Namun jajak pendapat memberikan hasil tidak menggembirakan kalangan pendukung syariatisasi. Penggalangan dukungan bagi pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh beberapa elemen Gerakan Islam, terutama oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI).¹⁰

Di Makassar, aksi-aksi untuk menggalang dukungan untuk memberlakukan syariat Islam berlangsung dengan gencar. Gerakan ke arah ini telah dirintis pada tahun 1999, hanya selang beberapa waktu setelah jatuhnya Presiden Soeharto. Dalam sebuah kongres akbar, yakni Kongres Umat Islam (KUI) I, Yang dihadiri ribuan umat Islam pada tahun 1999, diputuskan untuk membentuk semacam tim untuk melancarkan agenda tersebut. Selain itu di Sulawesi juga berdiri beberapa fron atau laskar-laskar yang secara khusus dipersiapkan untuk turut membentengi perjuangan penegakan syariat Islam. Salah satunya laskar yang terkemuka adalah Laskar Jundullah pimpinan Agus Dwikarna. Di samping menjadi pengawal, dari gerakan-

⁸ Taufik Adnan dan Samsu Rizal Pangabea, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Negeria*, (Jakarta: Alvabet, 2004), dalam buku M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*,..... h, 172

⁹ Sarlito Wirawan, *Terorisme di Indonesia*, (Jakarta: Alvabet, 2012)h. 172-173

¹⁰ Abdul Aziz Kahar Muzakar, Ketua KPPSI, dalam *Majalah Sabili*, No.1 TahunX, 25 Juli 2002

gerakan yang memperjuangkan syariat Islam, mereka juga mensuplai banyak relawan dalam berbagai konflik antar agama di beberapa daerah di Indonesia.¹¹

Di Kalimantan Selatan, aroma keinginan beberapa elite politik untuk melaksanakan pemberlakuan syariat Islam juga terlihat jelas. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Banjar, ketentuan untuk memberlakukan syariat Islam ini secara sepihak dinyatakan oleh bupati terpilih Rudy Arifin, hanya beberapa saat setelah ia dilantik oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Keharusan untuk mengenakan jilbab bagi perempuan sekali lagi dijadikan objek garapan dalam proyek syariatisasi tersebut.¹²

Dalam acara Silaturahmi dan Diskusi Tokoh NU dengan BNPT dan Densus 88 / satgas anti teror di Hotel Rits Carlton Jakarta, 11 Maret 2015 berhasil merumuskan beberapa upaya untuk mencegah radikalisme di Indonesia yaitu:

Pertama, Deradikalisasi (soft Aproach). Tokoh-tokoh agama harus mengembangkan pemikiran Islam rahmatan lil'alam. Penyimpangan pemikiran kalangan teroris dan radikal dalam memaknai teks-teks Al-Qur'an dan Al-Hadist, harus diimbangi dengan harakah pemikiran sesuai dengan tafsir yang sejalan dengan nilai-nilai luhur ajaran Agama Islam. Ideologi dan theologi kekerasan harus kita lawan dengan ideologi dan theologi yang cinta damai. Termasuk pemikiran yang ingin mendirikan daulah Islamiyah di Negara RI dengan sistem khilafah Islamiyah, harus diluruskan dengan pemikiran Al-Wasathiyyah Al-islamiyyah wa Madzharuha fi Daulati Pancasila. Islam tawassuth dan manifestasinya dalam negara Pancasila, termasuk penjelasan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 45.

Kedua, penindakan (hard approach), artinya harus ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk menindak pada kelompok-kelompok teroris dan radikal, termasuk golongan yang anti NKRI dan Pancasila. Tindakan tegas ini tentu tidak hanya dipihak hilir, justru yang sangat urgen adalah pihak hulunya sebagai aktor intelektual dan pensuplai dana. Dalam tindakan tegas yang harus dengan kekerasan senjata maupun fisik, pihak densus 88 harus dengan ukuran akurasi dan

presisi yang valid. Pihak pemerintah dalam hal ini kepolisian dan TNI jangan menunggu masyarakat yang harus mengadili dan menghakimi mereka.

Ketiga; Pembinaan, pemerintah harus mengetahui warga Negara Indonesia yang ada diluar negeri, terutama mereka yang menimba ilmu maupun yang bekerja. Bagi mereka yang terindikasi dididik oleh negara yang di dalamnya terindikasi doktrin-doktrin kekerasan, maka sebelum mereka menyebarluaskan pahamnya itu harus diadakan orientasi tentang keIndonesiaan. Juga perlu mengadakan program pembinaan kepada masyarakat seperti pelatihan anti radikalisme dan terorisme kepada Ormas. Sosialisasi kepada segenap unsur pendidikan, Training of Trainer (ToT) kepada civitas lembaga pendidikan keagamaan merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk menguatkan kewaspadaan dini masyarakat. Khususnya generasi muda terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme. Implementasi strategi kontra radikalisasi yang integratif dan komprehensif dilakukan dengan melakukan berbagai penelitian dan kajian mendalam mengenai anatomi kelompok radikal terorisme, sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, pembinaan keagamaan terhadap napi terorisme dan keluarganya, serta gerakan moral masyarakat yang melibatkan segenap unsur masyarakat sipil seperti media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat terkait dalam upaya pencegahan radikal terorisme.

Keempat; Pemerintah tentu tidak bisa sendiri melakukan penanggulangan terorisme dan mencegah meningkatnya radikalisasi yang dilakukan jaringan terorisme, sehingga perlu mengajak masyarakat terutama tokoh-tokoh agama yang mempunyai visi dan misi nasionalis guna menyelamatkan kelangsungan NKRI.

Kelima, dari data yang ada, anak-anak bangsa yang ikut jaringan terorisme rata-rata memiliki kelemahan dalam bidang ekonomi, tidak mempunyai harapan hidup yang cerah sehingga mereka sangat mudah diajak untuk bergabung dengan kelompok terorisme karena ada janji-janji yang menggiurkan secara ekonomis. Karena itu tugas pemerintah ke depan harus terus berupaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.¹³

¹¹ Aziz dan Muzakar, Majalah Sabili, No 1....2002

¹² Majalah Saksi, No. 16, Tahun II, 5-8 April 2000

¹³ HM Misbahus Salam, Solusi Mengatasi Terorisme dan Radikalisasi, (Jakarta: 11 maret 2015)

Menurut Zaki Mubarak, Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Mencegah jelas lebih baik untuk menanggulangi terorisme yang berkedok agama, dibandingkan harus menyembuhkan.

Dari sisi agama, ada beberapa langkah yang dapat menangkal propaganda radikalisme terorisme tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain untuk meluruskan pemahaman ajaran agama dan menghindari kekeliruan yang sering terjadi. Tokoh agama dan tokoh masyarakat harus saling bekerjasama untuk menangkal paham ini. Juga melakukan pencegahan dari dalam umat beragama sehingga benih-benih itu tidak timbul. Apabila ada orang atau kelompok yang terjangkit paham radikalisme, hendaknya dilakukan pendekatan keagamaan secara simpatik, sehingga dapat menyadarkan kelompok ini. Perlu juga diadakan ceramah dan diskusi-diskusi yang simpatik dengan kelompok-kelompok yang terkontaminasi oleh kelompok radikal,

Paham radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bukan masalah baru tapi telah terjadi pada awal perkembangan agama-agama dunia. Kelompok ini salah dalam memahami ajaran agama, sehingga mengarah pada radikalisme. Penyebabnya, sebagian karena pemahaman agama yang sempit dan dangkal. Sebab lainnya adalah karena menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik. Dengan mengatasnamakan agama, mereka meyakini akan dapat mempengaruhi banyak orang, sehingga ambisinya terwujud.

Mencegahnya adalah dengan jalan memberikan pemahaman agama secara utuh, integral dan komprehensif sehingga ajaran agama itu tidak dipahami secara parsial yang mengakibatkan terjadi kesalahpahaman.

Langkah berikutnya adalah memberikan informasi kepada umat beragama agar tidak mudah diprovokasi oleh kelompok radikal, sehingga rencana mereka akan gagal. Kaitannya dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para penganut agama harus menyadari bahwa NKRI adalah merupakan bagian dari kehidupan beragama. Karena itu wajib dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat,

beragama, berbangsa, dan bernegara akan menjadi tenang.¹⁴

Menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Dede Rosyada, ancaman paham radikalisme dan ISIS itu sangat memungkinkan masuk ke Indonesia, karena Indonesia menghargai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pencegahannya harus benar-benar masif. Paham radikal terorisme tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan seperti yang dulu digunakan pemerintah Orde Baru. Sekarang pemerintah dan negara harus hadir melindungi rakyatnya dari ancaman-ancaman yang ditimbulkan dari gerakan tersebut terutama dengan memperkuat ideologi bangsa dan ekonomi rakyat.¹⁵

Ketika masih dalam urusan agama, radikal itu masih bisa didiskusikan di mushola-mushola atau masjid. Tetapi bila sudah keluar dari masalah agama dan masuk ke masalah sosial dan politik, serta melibatkan banyak orang, radikalisme itu harus dicegah dan diantisipasi. Karena, itu menjadi pintu masuk radikalisme tersebut. Dengan demikian, upaya pencegahan itulah yang harus dikedepankan dalam menciptakan kedamaian dan keutuhan NKRI.¹⁶

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.¹⁷

F. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dan membuat laporan hasil penelitian terhadap upaya Bakor

¹⁴ Abdus Salam, mencegah-cara-efektif-lawan-radikalisme-terorisme, (Jaakarta: guntur press 2013), h. 71

¹⁵ Damailahindonesiaku.com, mencegah-cara-efektif-lawan-radikalisme-terorisme 21 Maret 2016

¹⁶ Damailahindonesiaku.com, mencegah-cara-efektif-lawan-radikalisme-terorisme 21 Maret 2016

¹⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta. 2015), h.15

Pakem mencegah berkembangnya potensi radikal di Kepahiang, penulis akan memberikan sebuah analisa atau membahas hasil penelitian tersebut yang dikomparasi dengan landasan teori sebagai landasan dalam penelitian ini. Adapun pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Potensi Radikalisme di Kepahiang

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia telah diberi berbagai potensi yang dengan segala potensi tersebut manusia bisa untuk berkembang dari segala aspek kehidupan. Karena potensi yang dianugerahkan Allah tersebut, manusia diberi amanat sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah berikut ini.

Q.S. Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah Engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Sedangkan kami bertasbih memujiMu dan mensucikan namaMu. Allah berfirman Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah: 30)

Dengan segala potensi yang ada padanya, manusia mampu mengelola bumi ini dari masa ke masa. Sejarah panjang manusia ini juga telah meninggalkan cerita tentang kebaikan dan kemajuan dari berbagai bidang. Selain cerita tentang kesuksesan kebaikan manusia juga ada kisah tentang kejahatan yang berujung pada berbagai kerusakan di muka bumi ini. Potensi manusia sebagai ciptaan Allah yang cenderung kepada kebaikan dan kerusakan, dapat dilihat pada Surat Asy-Syamsi ayat 8-10.

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ

Artinya: Maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan

jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. (QS. Asyamsyi, 8-10)

Dari ayat-ayat Allah di atas, penulis melihat bahwa manusia sungguh sebuah makhluk yang diciptakan Allah dengan banyak potensi. Potensi manusia tersebut bahkan tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti malaikat. Hanya saja potensi manusia tidak hanya pada kebaikan, prestasi dan manfaat. Manusia juga berpotensi menjadi rusak dan menjadi perusak terhadap alam dan sesamanya.

Dalam hal potensi radikal di Kabupaten Kepahiang, penulis membagi potensi itu kepada tiga bagian yaitu:

Pertama, manusia dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kepahiang berpotensi menjadi manusia yang berfaham radikal yang bersifat positif. Radikal positif yang penulis maksud adalah adanya kecintaan, kesungguh-sungguhan dan fanatisme yang mengakar, mendalam dan berdasar kuat terhadap agama yang mereka anut dan akui kebenarannya, suku sebagai identitas dan kebanggaannya serta politik yang mereka yakini sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan pribadi kelompok dan golongan mereka.

Radikalisme terhadap agama yang dianut masyarakat bukanlah merupakan sesuatu yang haram dan terlarang. Namun sesuatu yang harus dimiliki seseorang. Sebagai umat Islam seseorang harus bangga dengan keislamannya, sebagai seorang Kristen ia harus bangga dengan Kristennya, Orang Hindu dan Budha, harus bangga dengan agamanya tersebut. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, dalam memeluk agama seseorang memang perlu dan mesti radikal dalam pengertian mempunyai keyakinan yang mengakar. Tetapi, yang tidak boleh bukan radikalisme terhadap keyakinan itu, melainkan sikapnya yang menjadi brutal lalu tidak toleran pada pihak lain bahkan mewajibkan kekerasan untuk membela keyakinannya itu.¹⁸

Kedua, selain memiliki potensi radikal yang bersifat positif, masyarakat pemeluk agama di Kepahiang juga memiliki potensi radikalisme yang mengarah kepada sikap-sikap negatif dalam artian tidak sesuai dengan tatanan pemerintah dan kemajemukan masyarakat. Karena, radikalisme yang kedua ini cenderung

¹⁸ Situs Kementerian Agama RI, Menteri Agama, Orang Beragama Harus Radikal, 16 April 2015

kasar dan tidak toleran kepada orang yang tidak sepaham dengan orang tersebut.

Adanya potensi radikal yang kedua ini, berlatar belakang dari pemahaman agama yang difahami dengan dangkal dan hanya bersifat pergerakan. Analisa penulis ini sejalan dengan pendapat tokoh-tokoh NU dalam silaturahmi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) pada tanggal 11 Maret 2015 di Hotel Rits Calrton Jakarta yang penulis jadikan sebagai landasan teori pada bab II.

Tokoh-tokoh agama harus mengembangkan pemikiran Islam rahmatan lil'alam. Penyimpangan pemikiran kalangan teroris dan radikal dalam memaknai teks-teks Al-Qur'an dan Al-Hadist, harus diimbangi dengan harakah pemikiran sesuai dengan tafsir yang sejalan dengan nilai-nilai luhur ajaran Agama Islam. Ideologi dan theologi kekerasan harus kita lawan dengan ideologi dan theologi yang cinta damai. Termasuk pemikiran yang ingin mendirikan daulah Islamiyah di Negara RI dengan sistem khilafah Islamiyah, harus diluruskan dengan pemikiran Al-Wasathiyah Al-Islamiyyah wa Madzharuha fi Daulati Pancasila. Islam tawassuth dan manifestasinya dalam negara Pancasila, termasuk penjelasan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 45.¹⁹

Menurut Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Zainal Abidin. Potensi radikalisme terjadi dan muncul akibat pemahaman agama yang sempit dan tertutup. Orang yang tertutup dan sempit pandangannya terhadap ajaran agama akan berpotensi menjadi radikal. Sehingga, mereka sanggup memperjuangkan keyakinannya sampai kepada pertumpahan darah.²⁰

Ketiga, Potensi radikal masyarakat yang sudah meningkat ketahap membentuk komunitas, kelompok dan organisasi. Karena dengan membentuk komunitas, kelompok dan organisasi, mereka punya wadah untuk bertukar fikiran dan merumuskan sesuatu. Dengan organisasi juga, mereka dapat melakukan rekrutman dan menggalang solidaritas untuk memperjuangkan aspirasi, pikiran dan tujuan mereka. Karena di

Kepahiang tidak ada wadah organisasi yang mereka anggap mampu dan ideal untuk aktifitas pergerakannya, maka orang-orang dengan potensi ini bergabung dengan organisasi-organisasi di tempat lain.

Beberapa orang masyarakat Kepahiang telah bergabung atau berafiliasi dengan organisasi-organisasi yang dinilai radikal oleh pemerintah dan aparat keamanan negara Indonesia seperti Fron Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang ada di tempat lain.

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Gafatar dideklarasikan pada tanggal 21 Januari 2012 di gedung JIEXPO Kemayoran. Pemikiran yang dijadikan dasar pedirian Gafatar adalah: "Bahwa bangsa Indonesia belum juga bisa merdeka seutuhnya dari sistem penjajahan neokolonialis dan neoimperialis, sehingga kekayaan bangsa ini terus-menerus diperas oleh negara-negara penjajah dan secara tidak sadar telah menjadikan bangsa asing sebagai tuan di negeri sendiri".²¹

Pemikiran tersebut melahirkan sebuah tekad yang kuat berdirinya Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) untuk mengubah bangsa dalam mensejahterakan rakyatnya. Bahkan menurut Ketua Umum Gafatar Mahful M. Tumanurung, kebiasaan hidup dengan gaya feodalis yang mendewakan penjajah, dan mental budak sebagai bangsa tertindas masih membumi dalam kehidupan keseharian. Untuk itu kata Mahful, harus di rubah, terlebih hadirnya sikap imperialis-kolonialis yang saat ini menjangkiti generasi bangsa, harus secepatnya dikikis habis.²²

Visi: Terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai universal agar menjadi rahmat bagi semesta alam.²³

Missi: Memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan khususnya antar sesama elemen bangsa Indonesia serta dunia pada

¹⁹ HM Misbahus Salam, Solusi Mengatasi Terorisme dan Radikalisasi, (Jakarta: 11 maret 2015) <http://www.muslimmedianews.com>

²⁰ Rimanews, Dialog Publik Menangkal Radikalisme Atas nama Agama. (Palu: 27 November 2015)

²¹ <https://ormasgafatar.wordpress.com>

²² <https://ormasgafatar.wordpress.com>

²³ <https://ormasgafatar.wordpress.com>

umumnya. Selain itu, juga memupuk saling pengertian dan kerja sama antar sesama lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia.²⁴

Sebagai organisasi yang dibubarkan secara paksa dari basis mereka di Kalimantan, para anggota eks gafatar di Kepahiang kelihatan tidak ada aksi yang mereka lakukan, mereka kelihatan asing ketika berada dalam masyarakat dan kelihatan tidak percaya diri. Berkemungkinan sikap mereka ini akibat pemberitaan media yang mengekspos tentang Gafatar secara Nasional. Kehadiran orang-orang eks gafatar menjadi objek pengawasan oleh aparat kepolisian dan TNI.

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al Umm, Cempaka Putih, Jakarta. Berbeda dengan perkumpulan, organisasi keagamaan pada umumnya, maka peranan habib (tokoh-tokoh agama keturunan Arab) dalam FPI sangat dominan. Organisasi ini sejak pertama didirikan sampai saat ini dipimpin oleh seorang habib yang cukup muda bernama Habib Muhammad Rizieq Shihab yang populer dengan sebutan Habib Rizieq.²⁵

Keberadaan Front pembela Islam (FPI) hampir selalu dikaitkan dengan aksi-aksi penyisiran, penyerangan dan perusakan tempat-tempat yang mereka anggap sebagai sumber kemaksiatan seperti diskotik, tempat-tempat prostitusi, bar, karaoke, tempat perjudian dan sebagainya.²⁶

Menurut Zaki Mubarak, dapat disebut beberapa organisasi Islam berhaluan radikal kemudian cukup memberikan pengaruh luas dalam kepolitikan di era transisi demokrasi, antara lain Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ) Ahlussanah Wal jamaah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Gerakan Negara Islam Indonesia (NII).²⁷

Di kabupaten Kepahiang, sekalipun organisasi

Front pembela Islam (FPI) tidak ada terdaftar dan kepengurusannya menurut informasi masyarakat pernah melakukan sweeping di kawasan kebun teh di Kecamatan kabawetan. Mereka menggerebek anak-anak remaja yang berpacaran di areal kebun teh tersebut. Selanjutnya, beberapa anak muda yang mereka jaring, diserahkan kepada Kepala Desa dan Ketua pemuda setempat.²⁸

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiuddin an Nabahani pada tahun 1953. HT adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Perjuangan HT ditujukan untuk menjadikan Islam sebagai persoalan utama, serta membimbing untuk mewujudkan kembali sistem khilafah dan menegakan hukum yang diturunkan Allah di dalam kehidupan. Di Indonesia Hizbut Tahrir dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dikaitkan dengan keberadaan tokoh awalnya bernama Abdurrahman al Baghdadi, seorang mubaligh asal yordaniyah berkebangsaan australia. Kekhususan dari organisasi ini adalah dengan menggagas massanya yang besar untuk melakukan demonstrasi dengan menaikan serta mengusung ide pembentukan khilafah Islamiyah. Seiring dengan pemberlakuan Syariat Islam.²⁹

Berbagai kesulitan yang menyertai pergerakan Hizbut Tahrir di berbagai kawasan kiranya berpangkal pada ideologi dan cara berjuang yang dianggap terlalu radikal. Setidaknya, radikalisme yang diusung HT telah diperlihatkan dengan beberapa usaha kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak Islami yang beberapa kali dilakukan kelompok ini. Di Indonesia, meskipun wacana ideologis dan doktrin-doktrin yang ditawarkan HT bersifat radikal, tetapi pendetan atau pola yang dipraktekan di Indonesia bersifat Moderat. Ideologi pengkafiran yang banyak berserakan dalam indoktrinasi dan ulasan, termasuk pola-pola perjuangan yang dianggap radikal. Sebegitu jauh, doktrin-doktrin radikal ini belum tampak dalam praksis politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sepanjang era reformasi, berjalan persuasif dan damai. Hingga ada kesan yang muncul, rasionalisasi ideologi Hizbut Tahrir yang menjadi lebih lunak dalam implementasinya.³⁰

²⁴ Armstrong, Karen, *Perperangan Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam*, Kristen dan Yahudi, Bandung: Mizan, 2005

²⁵ M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia...*, h.116

²⁶ M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia...*, h.116 yang disarikan dari beberapa sumber yang dijadikan acuan untuk mengurai latar belakang berdirinya FPI dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, antara lain: Hasil Laporan Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Jakarta (2001) reportase dalam *Majalah Gatra*, 8 Januari 2000 dan wawancara dengan Habib Rizieq Shihab pada 26 Desember 2002.

²⁷ M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia...*, h. 110

²⁸ Nagiran, informan warga Kelurahan Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan..., 2015

²⁹ M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia...*, h.128

³⁰ M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam radikal di Indonesia...*, h. 131

Dari beberapa orang yang merupakan aktifis Hizbut Tahrir Indonesia, mereka menampilkan karakter Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka ada namun tidak berwujud dalam bentuk organisasi sebagaimana halnya HTI di Indonesia yang tidak jelas kepengurusannya. Di Kepahiang, orang-orang HTI banyak bergaul dengan kalangan terdidik seperti mahasiswa yang menuntut ilmu di luar Kepahiang seperti mahasiswa yang kuliah di Jawa dan Sumatera Barat serta pelajar di Kabupaten Kepahiang.

2. Langkah-langkah pencegahan berkembangnya potensi radikal

Upaya pencegahan perkembangan potensi radikalisme oleh segenap instansi pemerintah dan organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kepahiang, sudah memiliki langkah-langkah yang sudah terprogram. Selain itu secara instansi dan organisasi, elemen-elemen Bakor Pakem Kepahiang telah melakukan upaya pencegahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hanya saja upaya yang dilakukan hanya sebatas pencegahan secara persuasif dan sosialisasi secara formal dan tidak sampai pada tahap meluruskan paham atau konsep agama yang benar dan kaffah seperti upaya pencegahan sebagai ada pada landasan teori penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Deradikalisasi (soft Aproach). Tokoh-tokoh agama harus mengembangkan pemikiran Islam rahmatan lil'alamin. Penyimpangan pemikiran kalangan teroris dan radikal dalam memaknai teks-teks Al-Qur'an dan Al-Hadist, harus diimbangi dengan harakah pemikiran sesuai dengan tafsir yang sejalan dengan nilai-nilai luhur ajaran Agama Islam. Ideologi dan theologi kekerasan harus kita lawan dengan ideologi dan theologi yang cinta damai. Termasuk pemikiran yang ingin mendirikan daulah Islamiyah di Negara RI dengan sistem khilafah Islamiyah, harus diluruskan dengan pemikiran Al-Wasathiyah Al-Islamiyyah wa Madzharuha fi Daulati Pancasila. Islam tawassuth dan manifestasinya dalam negara Pancasila, termasuk penjelasan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 45.

Kedua, penindakan (hard approach), artinya harus ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk menindak pada kelompok-kelompok teroris dan radikal, termasuk golongan yang anti NKRI dan

Pancasila. Tindakan tegas ini tentu tidak hanya dipihak hilir, justru yang sangat urgen adalah pihak hulunya sebagai aktor intelektual dan pensuplai dana. Dalam tindakan tegas yang harus dengan kekerasan senjata maupun fisik, pihak densus 88 harus dengan ukuran akurasi dan presisi yang valid. Pihak pemerintah dalam hal ini kepolisian dan TNI jangan menunggu masyarakat yang harus mengadili dan menghakimi mereka.

Ketiga; Pembinaan, pemerintah harus mengetahui warga Negara Indonesia yang ada diluar negeri, terutama mereka yang menimba ilmu maupun yang bekerja. Bagi mereka yang terindikasi dididik oleh negara yang di dalamnya terindikasi doktrin-doktrin kekerasan, maka sebelum mereka menyebarluaskan pahamnya itu harus diadakan orientasi tentang keIndonesiaan. Juga perlu mengadakan program pembinaan kepada masyarakat seperti pelatihan anti radikalisme dan terorisme kepada Ormas. Sosialisasi kepada segenap unsur pendidikan, Training of Trainer (ToT) kepada civitas lembaga pendidikan keagamaan merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk menguatkan kewaspadaan dini masyarakat. Khususnya generasi muda terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme. Implementasi strategi kontra radikalisasi yang integratif dan komprehensif dilakukan dengan melakukan berbagai penelitian dan kajian mendalam mengenai anatomi kelompok radikal terorisme, sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, pembinaan keagamaan terhadap napi terorisme dan keluarganya, serta gerakan moral masyarakat yang melibatkan segenap unsur masyarakat sipil seperti media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat terkait dalam upaya pencegahan radikal terorisme.

Keempat; Pemerintah tentu tidak bisa sendiri melakukan penanggulangan terorisme dan mencegah meningkatnya radikalisasi yang dilakukan jaringan terorisme, sehingga perlu mengajak masyarakat terutama tokoh-tokoh agama yang mempunyai visi dan misi nasionalis guna menyelamatkan kelangsungan NKRI.

Kelima, dari data yang ada, anak-anak bangsa yang ikut jaringan terorisme rata-rata memiliki kelemahan dalam bidang ekonomi, tidak mempunyai harapan hidup yang cerah sehingga mereka sangat mudah diajak untuk bergabung dengan kelompok terorisme karena ada janji-janji

yang menggiurkan secara ekonomis. Karena itu tugas pemerintah ke depan harus terus berupaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.³¹

Menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Dede Rosyada, ancaman paham radikalisme dan ISIS itu sangat memungkinkan masuk ke Indonesia, karena Indonesia menghargai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pencegahannya harus benar-benar masif. Paham radikal terorisme tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan seperti yang dulu digunakan pemerintah Orde Baru. Sekarang pemerintah dan negara harus hadir melindungi rakyatnya dari ancaman-ancaman yang ditimbulkan dari gerakan tersebut terutama dengan memperkuat ideologi bangsa dan ekonomi rakyat.³²

Dari sisi agama, ada beberapa langkah yang dapat menangkal propaganda radikalisme terorisme tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain untuk meluruskan pemahaman ajaran agama dan menghindari kekeliruan yang sering terjadi. Tokoh agama dan tokoh masyarakat harus saling bekerjasama untuk menangkal paham ini. Juga melakukan pencegahan dari dalam umat beragama sehingga benih-benih itu tidak timbul. Apabila ada orang atau kelompok yang terjangkit paham radikalisme, hendaknya dilakukan pendekatan keagamaan secara simpatik, sehingga dapat menyadarkan kelompok ini. Perlu juga diadakan ceramah dan diskusi-diskusi yang simpatik dengan kelompok-kelompok yang terkontaminasi oleh kelompok radikal.³³

Paham radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bukan masalah baru tapi telah terjadi pada awal perkembangan agama-agama dunia. Kelompok ini salah dalam memahami ajaran agama, sehingga mengarah pada radikalisme. Penyebabnya, sebagian karena pemahaman agama yang sempit dan dangkal. Sebab lainnya adalah karena menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik. Dengan

mengatasnamakan agama, mereka meyakini akan dapat mempengaruhi banyak orang, sehingga ambisinya terwujud.

Mencegahnya adalah dengan jalan memberikan pemahaman agama secara utuh, integral dan komprehensif sehingga ajaran agama itu tidak dipahami secara parsial yang mengakibatkan terjadi kesalahpahaman.

Langkah berikutnya adalah memberikan informasi kepada umat beragama agar tidak mudah diprovokasi oleh kelompok radikal, sehingga rencana mereka akan gagal. Kaitannya dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para penganut agama harus menyadari bahwa NKRI adalah merupakan bagian dari kehidupan beragama. Karena itu wajib dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara akan menjadi tenang.³⁴

Dari sisi agama, ada beberapa langkah yang dapat menangkal propaganda radikalisme terorisme tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain untuk meluruskan pemahaman ajaran agama dan menghindari kekeliruan yang sering terjadi. Tokoh agama dan tokoh masyarakat harus saling bekerjasama untuk menangkal paham ini. Juga melakukan pencegahan dari dalam umat beragama sehingga benih-benih itu tidak timbul. Apabila ada orang atau kelompok yang terjangkit paham radikalisme, hendaknya dilakukan pendekatan keagamaan secara simpatik, sehingga dapat menyadarkan kelompok ini. Perlu juga diadakan ceramah dan diskusi-diskusi yang simpatik dengan kelompok-kelompok yang terkontaminasi oleh kelompok radikal,

Paham radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bukan masalah baru tapi telah terjadi pada awal perkembangan agama-agama dunia. Kelompok ini salah dalam memahami ajaran agama, sehingga mengarah pada radikalisme. Penyebabnya, sebagian karena pemahaman agama yang sempit dan dangkal. Sebab lainnya adalah karena menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik. Dengan mengatasnamakan agama, mereka meyakini

³¹ HM Misbahus Salam, Solusi Mengatasi Terorisme dan Radikalisasi, (Jakarta: 11 Maret 2015) <http://www.muslimmedianews.com>

³² <https://damailahindonesiaku.com/mencegah-cara-efektif-lawan-radikalisme-terorisme> 21 Maret 2016

³³ <https://damailahindonesiaku.com/mencegah-cara-efektif-lawan-radikalisme-terorisme> 21 Maret 2016

³⁴ <https://damailahindonesiaku.com/mencegah-cara-efektif-lawan-radikalisme-terorisme> 21 Maret 2016

akan dapat mempengaruhi banyak orang, sehingga ambisinya terwujud.

Mencegahnya adalah dengan jalan memberikan pemahaman agama secara utuh, integral dan komprehensif sehingga ajaran agama itu tidak dipahami secara parsial yang mengakibatkan terjadi kesalahpahaman.

Langkah berikutnya adalah memberikan informasi kepada umat beragama agar tidak mudah diprovokasi oleh kelompok radikal, sehingga rencana mereka akan gagal. Kaitannya dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para penganut agama harus menyadari bahwa NKRI adalah merupakan bagian dari kehidupan beragama. Karena itu wajib dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara akan menjadi tenang.³⁵

Upaya pencegahan potensi radikal di Kepahiang belum ada yang sampai pada tindakan yang represif dan tindakan hukum. Tentunya semua upaya pencegahan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang menilai tidak ada indikasi yang membahayakan bagi masyarakat, daerah dan negara.

Langkah-langkah dalam upaya pencegahan berkembangnya potensi radikalisme di Kabupaten Kepahiang, setidaknya telah memperlihatkan bahwa semua elemen bertanggung jawab mencegah dan menangkal radikalisme di Kepahiang. Bagi orang-orang yang terkena virus radikalisme yang ditularkan oleh orang atau organisasi tertentu, akan berfikir ulang tentang pemahaman dan doktrin yang mereka dapat selama ini dan membandingkannya dengan apa-apa yang dilakukan oleh Bakor pakem.

Menurut penulis, pemerintah harus sensitif terhadap aspirasi dan inspirasi masyarakat. Sehingga tingkat kekecewaan kepada pemerintah dapat berkurang. Masyarakat dapat menjadikan pemerintah sebagai pihak yang adapat diaandalkan untuk keinginan masyarakat. Hal ini akan dapat membuat orang-orang yang radikal menjadi tenang. Karena pemerintah sudah ada pada posisi yang proporsional dan profesional mengelola negara. Mereka yang di nilai radikal, hanyalah karena mereka dianggap

berseberangan dengan pemerintah. Padahal yang mereka perjuangkan adalah sebuah kebenaran karena kecewa dengan segala fakta yang mereka lihat tidak cocok. Pada prinsipnya, radikalisme itu boleh selama bertujuan pada hal-hal positif. Karena radikalisme adalah sebuah kesungguh-sungguhan dalam beragama dan menjadi makhluk sosial. Sedangkan reaksi organisasi seperti FPI adalah sebuah peran yang dimainkan karena tidak berfungsinya pihak terkait sehubungan prihal yang dianggap sebagai sebuah masalah. Sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah peran umat yang harus diapresiasi oleh pemerintah. Karena peran ini, pada hakikatnya adalah membantu pemerintah dalam hal membangun kepribadian masyarakat.

G. Kesimpulan

Dari data yang penulis temukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari proses penelitian tesis yang berjudul: Upaya Bakor Pakem dalam Mencegah Perkembangan Potensi Radikalisme di Kabupaten Kepahiang. Adapun kesimpulan penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi radikal di Kabupaten Kepahiang adalah bersifat keagamaan.
2. Potensi radikal di Kabupaten Kepahiang merupakan aktifis dari organisasi Fajar Nusantara (Gafatar).
3. Upaya pencegahan potensi radikalisme oleh Bakor Pakem Kabupaten Kepahiang terdiri dari beberapa langkah antara lain:
 - a. Menghimpun informasi
 - b. Membahas informasi dalam rapat Bakor Pakem
 - c. Memberdayakan tim Bakor Pakem sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota untuk mencegah radikalisme
 - d. Pencegahan radikalisme secara kolektif oleh Bakor Pakem

H. Daftar Pustaka

- Amin Rais, Cakrawala Islam, Bandung: Mizan, 1996
- Abdul Aziz, Varian-Varian Fundamentalisme Islam di Indonesia, Jakarta: Diva Pustaka, 2006
- Abdul Aziz, Gerakan Islam Kontemporer Di

³⁵ <https://damailahindonesiaku.com/mencegah-cara-efektif-lawan-radikalisme-terorisme> 21 Maret 2016

- Indonesia, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999
- Abdul Qodir, Gambaran Global Pemerintahan Islam, Surabaya: RAP. 2001
- Abdul Umar, Konspirasi intelijen dan Gerakan Islam Radikal, Jakarta: Cedsos, 2005
- Ali Asa'ad Said, Tali Temali NII dan Radikalisme, (Jakarta: Sumber Berkah Sarana, 2011
- Abdul Aziz, Islam Fundamentalisme perguruan tinggi umum, kasus gerakan keagamaan mahasiswa Sriwijaya Palembang, Jakarta: Diva Pustaka, 2006
- Abid Al Jabari, Muhammad. Agama, Negara dan Penerapan Syariah. Yogyakarta: Fajar Pustaka 2001
- Afif Muhammad, Agama dan Konflik sosial, Jakarta: Lembaga Sosial risech, 2009
- A Ezzati, Gerakan Islam: Sebuah Analisa. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990
- Afif Muhammad, NII Dan Radikalisme, Jakarta: Sumber Berkah Sarana, 2011
- Alhuda, AlQuran Tiga Bahasa, Depok: 2009
- Azumardi Azra, Muslimin Indonesia: Viabilitas "Garis Keras" Gatra 2001
- Amstrong, Karen, Perperangan Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen dan Yahudi, Bandung: Mizan, 2005
- Burel RM, Fundamental Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003
- Bobby S Sayyid, Fundamental Fair. Euroctrism and the Emergence of Islamism. London & New York: Zed Books, 1997
- Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Devis Munandar, Strategi Kantor Kementerian Agama Rejang Lebong Mencegah Radikalisasi di Rejang Lebong. Bengkulu Tesis, IAIN Bengkulu, 2015
- Data Masyarakat. Co.Id, Jaksa Agung Harus Prosedural, 22 Desember 2007
- Didin Hafiudin, Kriteria –Kriteria Aliran (Islam) yang Sesat dan Menyesatkan, Bogor: TPB IPB 2007
- Din Syamsudin, Usaha pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996
- Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas, Bandung: Pustaka, 2003
- Galtung Johan, Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, Surabaya: Eureka, 2003
- [Http://id.Wikipedia.org/wiki/Raikalisme](http://id.Wikipedia.org/wiki/Raikalisme) . 2015
- Hermawan Press. Com, 2016
- [Https:// Id wikipedia. Tentara_Nasional_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia)
- Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad, Yogyakarta: Al-Zikra, 2001
- Karen Amstrong, Perang Suci: Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk, Jakarta: Serambi, 2001
- Komaruddin Hidayat, Islam, Negara dan civil society: Gerakan dan Pemikiran Kontemporer, Jakarta: Paramadina 2007
- LKPM, Research Book For LKPPM, Malang: LKPPM, 2005
- Munir Mulkan, Abdul, Teologi Kebudayaan, Yogyakarta: Alvabet, 2012
- Muhammad, Agama dan Konflik Sosial, Bandung: Marja, 2013
- Musa Asy'arie, Filsafat Islam, Sunah Nabi Dalam Berfikir, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta: 1999
- M, Zaki Mubarak, Genealogi Islam Radikal di Indonesia, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi. Jakarta: Pustaka LP3ES 2008
- Masri Singarimbun, Sopian Efendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1987
- M. Amin Djamiluddin, Kupas Tuntas Kesesatan &Kebohongan LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Jakarta: LPPI, 2008
- Muhammad, Agama, Negara dan Penerapan Syariah, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001
- M Imdandum dan Rahmat, Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia, Jakarta: Airlangga, 2012
- Muhammad Abid, Agama, Negara dan Penerapan Syariah, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001
- Nursam, Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam, Surabaya: Eureka, 2005
- Nasir Abas, Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2005
- Nana Sujana, Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002
- Pelayanmasyarakat. Blokspot.co.id, 2016

Rudi Hariansyah Alam, Redaksi. Com

Robert Gurr, wey Men Rebel, Princeton NJ:
Princeton University Press, 1970

Rudi Harisyah Alam, Potensi Partisipasi Muslim
Dalam Tindakan Kekerasan, Jakarta: Balai
Litbang Agama, 2012

Shufyan Raji', Abdullah, Mengenal Aliran-Aliran
Dalam Islam, Jakarta: Pustaka Al Riyadi, 2007

Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia,
Jakarta: Paramadina 2009

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian,
jakarta: Rineka Cipta, 2005

